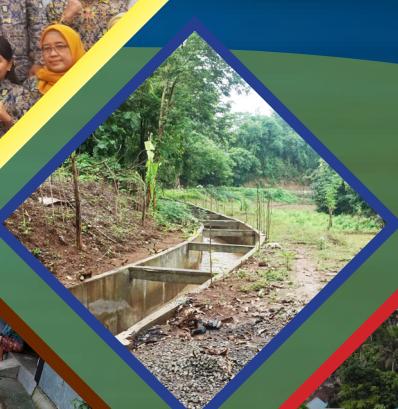




BULETIN PFIP

• • • • FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH • • • •

KONSULTASI PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK INFRASTRUKTUR PUPR TAHUN ANGGARAN 2022



**DAK FISIK CADANGAN
BIDANG SANITASI TA. 2021
UNTUK MENDUKUNG PENANGANAN PERSAMPAHAN
DI KAWASAN SARBAGITA**

MONITORING DAN EVALUASI DAK
BIDANG IRIGASI, JALAN & JEMBATAN,
PERUMAHAN & PERMUKIMAN

PENYUSUNAN KONSEP PETUNJUK
OPERASIONAL PENGELOLAAN DAK
INFRASTRUKTUR TA. 2022

PENDAMPINGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS DAK FISIK
INFRASTRUKTUR PUPR

CATATAN TIM REDAKSI

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) bertugas untuk meningkatkan kemantapan infrastruktur PUPR daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan air; konektivitas dan aksesibilitas bagi penguatan daya saing; dan layanan infrastruktur dasar sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. PFID berusaha untuk terus menerus melaksanakan kegiatan mulai dari tahap perencanaan; pemrograman; pembinaan dan pengawasan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur daerah demi tercapainya tugas diatas agar dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Buletin PFID ini berisi tentang peraturan, kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 4 (empat) bidang di PFID yaitu Bidang Perencanaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan, Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air, dan Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman. Buletin PFID Edisi ke-8/Okttober-Desember Tahun 2021 ini bertema tentang Monitoring dan Evaluasi, Penyusunan Rencana Kegiatan DAK, Penyusunan Konsep Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Infrastruktur TA. 2022 dan Pendampingan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Rencana Strategi DAK Fisik Infrastruktur PUPR

Selamat membaca.

Tim Redaksi

SUSUNAN TIM REDAKSI

Pelindung

Mohammad Zainal Fatah

Penanggung Jawab

Riono Suprarto

Dewan Redaksi

Anum Kurniawan,
Sari Satria Dwipayana
Nova Dorma Sirait
Andie Pramudita Said
Wara Novela

Pemimpin Redaksi

Rosita Darmastuti

Anggota Redaksi

Hidemiwan, Hery Heryana,
Desi Meriana,
Irma Rahmawati, Indah
Indriaspriuti, Leviana Okvianty,
Rethon M. Canopy

Penyunting Redaksi

Indra Jaya KGP, Arbisani,
Rani Nur. I , Arif Furqan

Bagian Produksi

Agus Sugiono, Dewi Udiarti,
Zamzuli, Asep Sultoni

Bagian Distribusi

Eka Widyaningtyas
Didik Santoso

Kontributor

Anum Kurniawan,
Nova Dorma Sirait,
Indah Indriaspriuti,
Irma Rahmawati,
Leviana Okvianty,
Rethon M. Canopy,
Indra Jaya KGP,
Brigitta Yolanda,
Pujiati Rahayu, Akram Yonda,
Ganang S, Danang Priambodo,
Robby Hidayat.

Desain

Prayudi Anggia

Alamat Redaksi

Gedung Heritage PUPR Lt.4
Jl. Pattimura No.20,
Kebayoran Baru Jakarta
Selatan, 12110,



021-27932834



pfid.setjen@pu.go.id



<https://setjen.pu.go.id/pfid/>



Pusat FID



@pusatfid

KONSULTASI PROGRAM DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) FISIK INFRASTRUKTUR
PUPR TA. 2022

5



PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN (RK)
DAK FISIK BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
TA. 2022

17



MONITORING DAN EVALUASI
BIDANG JALAN
DI KABUPATEN KLUNGKUNG

24



PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN (RK)
DAK FISIK BIDANG IRIGASI TA 2022

11



MONITORING DAN EVALUASI DAK
BIDANG IRIGASI
KABUPATEN JEPARA TA 2021

20





DAK FISIK CADANGAN
BIDANG SANITASI TA. 2021
UNTUK MENDUKUNG PENANGANAN
PERSAMPAHAN
DI KAWASAN SARBAGITA

34

KUNJUNGAN KOORDINASI
DAK BIDANG SANITASI DAN
PERUMAHAN DI KOTA MATARAM

27



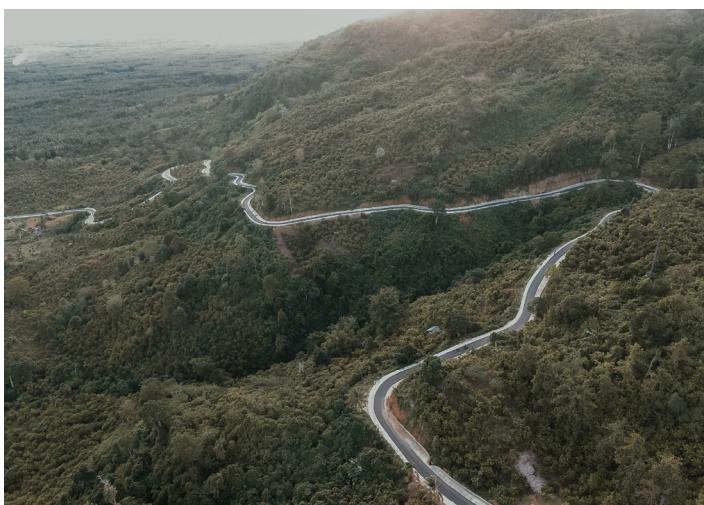
PENYUSUNAN KONSEP PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DAK
INFRASTRUKTUR TA. 2022

36

PENDAMPINGAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS DAK FISIK
INFRASTRUKTUR PUPR

38





KONSULTASI PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK INFRASTRUKTUR PUPR TA. 2022

Oleh : Anum Kurniawan
Indra Jaya Krisna

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur PUPR TA. 2021, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan pemantauan penyelemparaan fasilitasi infrastruktur daerah.

Alokasi DAK Infrastruktur PUPR Tahun 2022 telah ditetapkan se-

sar Rp. 19,665 T, untuk 32 Provinsi dan 504 Kabupaten/Kota. Alokasi tersebut menurun sebesar Rp. 126,5 Miliar (0.64 %) dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Sesuai dengan rancangan RPJMN 2020-2024, tema pembangunan Indonesia 5 tahun mendatang yaitu Indonesia Berpenghasilan Meningah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.

Selain itu, dalam menghadapi permasalahan Global yaitu Pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo memberikan pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus

2021 mengenai tema RAPBN TA. 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, yang akan diarahkan pada delapan hal utama, yaitu:

- Kesadaran, partisipasi dan kegotongroyongan masyarakat dinilai semakin baik dibidang kesehatan;
- Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin tinggi yang meliputi kebiasaan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak;
- Kesadaran dan antusiasme ma-



- syarakat untuk divaksin serta memperoleh layanan kesehatan, pengobatan dan saling peduli juga semakin tinggi;
- d. Kapasitas kelembagaan negara dalam merespon pandemi semakin terkonsolidasi dan bekerja semakin responsif;
 - e. Lembaga legislatif dan pemeriksa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk cepat mengkonsolidasi kekuatan fiskal;
 - f. Penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah maupun swasta mengalami peningkatan yang menggembirakan;
 - g. Kemandirian industri obat, vaksin dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus diselesaikan; dan
 - h. Pemerintah bekerja keras mengerahkan semua sumber daya demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional.

Untuk terwujudnya kegiatan diatas, Kementerian PUPR berkomitmen terhadap peningkatan kualitas Infrastruktur PUPR kewenangan daerah tetap terjaga seperti tahun-tahun sebelumnya. Adapun target yang perlu dicapai melalui penyelenggaraan DAK, meliputi:

- a. Kondisi mantap jalan daerah sebesar 75% untuk jalan provinsi, dan 65% untuk jalan kabupaten/kota;
- b. Pembangunan/peningkatan daerah irigasi seluas 2.667 Ha, peningkatan daerah irigasi seluas 14.545 Ha, rehabilitasi daerah irigasi seluas 86.887 Ha, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 16,7 Km;
- c. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 95,58% (termasuk akses aman 12,8%).

d. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak sebesar 82,07% (termasuk akses aman 11,5%).

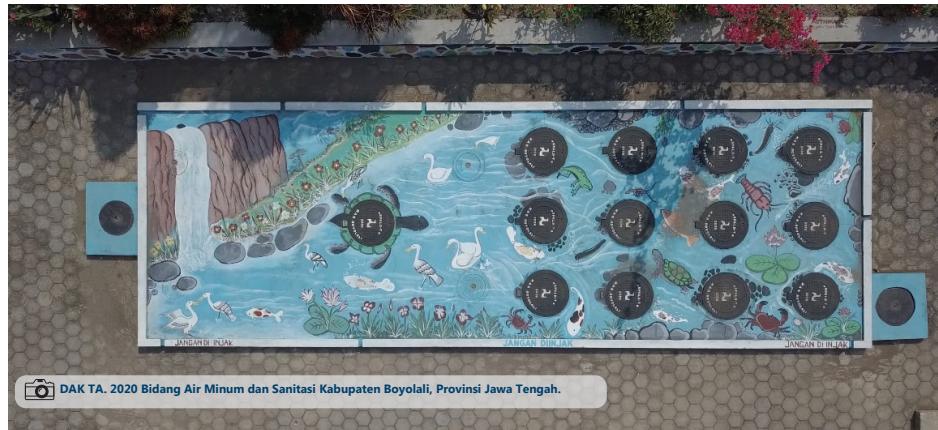
e. Rumah tangga yang menempati hunian layak sebesar 70%.

Secara umum, kebijakan dan tahapan pengelolaan DAK Infrastruktur PUPR TA. 2022 mendukung tema prioritas nasional yaitu :

- a. Pada jenis DAK Reguler dengan Tema Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Penyiapan SDM Berdaya Saing untuk Bidang Jalan, Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi, dan Bidang Permukiman;
- b. Pada jenis DAK Penugasan dengan Tematik 1 Penguatan DPP dan Sentra Industri Menengah untuk Bidang Jalan. Tematik 2 Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan untuk Bidang Irigasi dan Bidang Jalan. Tematik 3 Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk

Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua untuk Bidang Jalan.

Selain itu, terdapat terobosan baru dalam mekanisme penyelenggaraan DAK Infrastruktur khususnya Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan yang diberi nama DAK Integrasi. DAK Integrasi merupakan upaya Kementerian PUPR dalam mengintegrasikan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur Air Minum, Sanitasi dan Perumahan melalui mekanisme pembiayaan DAK yang dipadukan dengan sumber dana lainnya baik APBN maupun swasta dalam mengatasi permasalahan kawasan kumuh di daerah.



Konsultasi Program DAK Fisik Infrastruktur TA. 2022 telah dilaksanakan melalui dua cara, secara online (zoom meeting) dan secara offline (tatap muka) dengan melibatkan seluruh peserta baik dari Pusat, Balai, Bappeda dan Dinas (daerah). Pelaksanaan konsultasi program diawali dengan Kickoff Meeting pada tanggal 7 Oktober 2022 dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Bapak Mohammad Zainal Fatah, dan dihadiri oleh Narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan arahan mengenai pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Kegiatan Kickoff Meeting juga merupakan bentuk persiapan dalam menghadapi kegiatan Konsultasi Program DAK Fisik TA. 2021 yang dibagi menjadi 3 Gelombang.

Bidang Perencanaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah sebagai Koordinator penyelenggaran acara Konsultasi Program, telah menyelenggarakan Konsultasi Program DAK Infrastruktur PUPR TA. 2021 pada tanggal 25 Oktober - 11 November 2020 dengan mengundang 536 Pemda penerima Alokasi DAK Infrastruktur, dengan tujuan menyampaikan kebijakan pengalokasian, pemanfaatan DAK Infrastruktur PUPR TA 2021 dan Melakukan pembahasan Rencana Kegiatan (RK) pemanfaatan DAK Infrastruktur PUPR 2022 per bidang, per Pemda. Adapun pembagian bidang meliputi Bidang Jalan dan Jembatan, Bidang Irigasi, serta Bidang Perumahan dan Perkotaan.



Bidang Jalan dan Jembatan

Kegiatan Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2022 diselenggarakan menjadi 3 Wilayah. Wilayah Barat dilaksanakan pada tanggal 25 - 28 Oktober 2021 di Hotel Grand Safero Bogor-Jawa Barat, dilanjutkan Wilayah Tengah pada 1 - 4 November 2021 di Hotel Luxton Cirebon-Jawa Barat, dan Wilayah Timur pada 8 - 11 November 2021 Hotel Grand Zuri Tangerang-Banten.



Kegiatan Konsultasi Program DAK Fisik Bidang Jalan TA. 2022

Wilayah Barat dilaksanakan melibatkan peserta dari Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera. Wilayah Tengah dilaksanakan melibatkan peserta dari Pemerintah Daerah di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Wilayah Timur dilaksanakan melibatkan peserta dari Pemerintah Daerah di Kepulauan Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua.

Pelaksanaan Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan TA 2022 berbeda dengan kegiatan konsultasi program pada tahun sebelumnya karena pelaksanaannya dilaksanakan secara tatap muka dan daring antara unsur pusat dan unsur daerah yang dilakukan via aplikasi Zoom karena pandemi Covid-19. SKPD sudah harus mempersiapkan seluruh data-data secara lengkap seperti DED, RAB, dan gambar desain.



Bidang Irigasi

Kegiatan Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2022 diselenggarakan menjadi menjadi 3 Wilayah. Wilayah Barat dilaksanakan pada tanggal 25 - 28 Oktober 2021 di Hotel Novotel Tangerang-Banten, dilanjutkan Wilayah Tengah pada 1 - 4 November 2021 di Hotel Aston Cirebon-Jawa Barat, dan Wilayah Timur pada 8 - 11 November 2021 Hotel Novotel Tangerang-Banten.

Wilayah Barat dilaksanakan melibatkan peserta dari Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera. Wilayah Tengah dilaksanakan me-

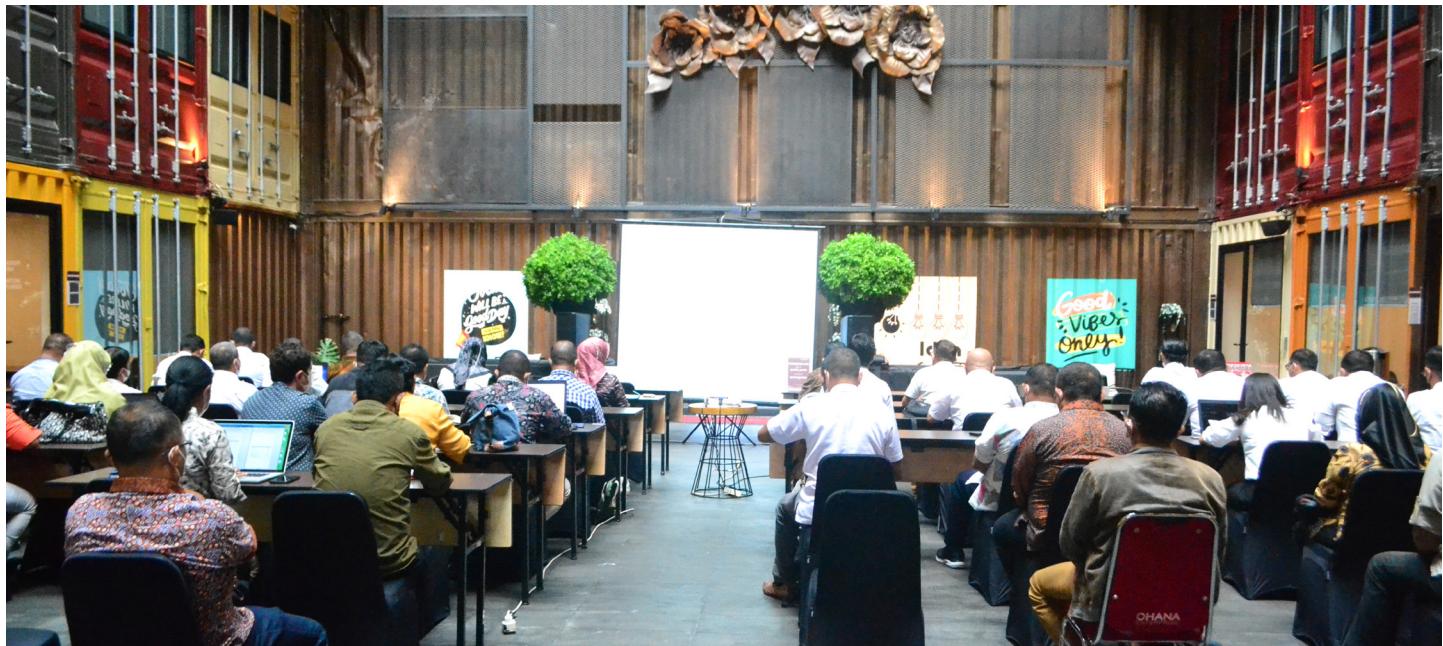
libatkan peserta dari Pemerintah Daerah di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Wilayah Timur dilaksanakan melibatkan peserta dari Pemerintah Daerah di Kepulauan Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua.

Pelaksanaan Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal, dibuktikan dengan sebagian besar daerah penerima DAK telah mengunggah rencana kegiatannya di Emonitoring DAK. Adapun beberapa point penting dalam kegiatan Konsultasi Program DAK Fisik Infrastruktur PUPR Bidang Irigasi TA 2022, yaitu

a. Penyusunan RK DAK Bidang Irigasi TA. 2022 memperhatikan besaran alokasi yang ditetapkan, penyesuaian jumlah dan/atau kebutuhan dana paket kegiatan

terhadap alokasi memperhatikan urgensi/skala prioritasnya;

- b. Telah menyelesaikan proses desk verifikasi RK DAK Bidang Irigasi TA 2022 dengan BBWS/BWS dan Dinas Provinsi sebelum masuk ke desk pusat;
- c. Memperhatikan pemanfaatan biaya penunjang sebesar 5% dari alokasi yang ditetapkannya di luar biaya fisik, khususnya untuk pelaksanaan e-Paksi dan jasa konsultan pengawas/supervisi;
- d. Pemda yang telah menyelesaikan proses verifikasi agar segera melakukan update input data usulan dalam aplikasi KRISNA dengan teliti sesuai dengan dokumen RK yang telah disetujui
- e. Memperhatikan tanggal-tanggal penting terkait batas wakru penyusunan RK;
- f. Perlunya langkah-langkah percepatan terkait penyelenggaraan dan tertib pelaporan DAK Bidang Irigasi TA 2021 oleh Pemda.



Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan

Kegiatan Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2022 diselenggarakan menjadi menjadi 3 Wilayah. Wilayah Barat dilaksanakan pada tanggal 25 - 28 Oktober 2021 di Hotel Padjajaran Bogor-Jawa Barat, dilanjutkan Wilayah Tengah pada 1 - 4 November 2021 di Hotel Grage Cirebon-Jawa Barat, dan Wilayah Timur pada 8 - 11 November 2021 Hotel Qubika Boutique-Tangerang.

Wilayah Barat dilaksanakan melibatkan peserta dari Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera. Wilayah Tengah dilaksanakan melibatkan peserta dari Pemerintah Daerah di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Wilayah Timur dilaksanakan melibatkan peserta dari Pemerintah Daerah di Kepulauan Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua.

Pelaksanaan Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK)



Kegiatan Konsultasi Program DAK Fisik Bidang Perkim TA. 2022

Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal, dibuktikan dengan sebagian besar daerah penerima DAK telah mengunggah rencana kegiatannya di Emonitoring DAK. Hal

ini tentunya mempercepat proses rekapitulasi target output dan outcome DAK Infrastruktur PUPR TA. 2022 *

KONSULTASI PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK INFRASTRUKTUR BIDANG IRIGASI TAHUN ANGGARAN 2022 WILAYAH TENGAH



PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN (RK) DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG IRIGASI TA 2022

Oleh : Nova Doma Sirait
Indah Indriaspriati
Danang Priambodo

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah (Pemda) dan sesuai dengan prioritas nasional. Pembangunan infrastruktur daerah merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan memeratakan pembangunan antar daerah.

DAK Fisik Bidang Irigasi TA 2022 termasuk dalam tematik Pengembangan 5 Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (dalam perkembangan redaksinya menjadi tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani) bersama dengan 6 bidang lainnya: 1) Pertanian; 2) Kelautan Perikanan; 3) Kehutanan; 4) Jalan; 5) Perdaganga; dan 6) Lingkungan Hidup yang mendukung Program Prioritas 3 “Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan” pada Prioritas Nasional 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan” dalam Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) 2022. Adapun kebijakannya diarahkan untuk memfasilitasi dan mendukung pengembangan Food Estate dan daerah pendukungnya secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihhan ekonomi nasional. Pengembangan Food Estate guna memperkuat cadangan pangan nasional sendiri dilakukan dengan memperhatikan 5 prinsip, yaitu: 1) Keberlanjutan; 2) Integratif; 3) Resilien; 4) Inklusif; serta 5) Maju dan Modern.

DAK Fisik Penugasan TA 2022 (termasuk Bidang Irigasi di dalamnya) menerapkan konsep THIS (Tematic, Holistik, Integratif, and Spasial) yang tercermin dalam desain tematik DAK Fisik Penugasan yang berbasis major projects



Kegiatan Konsultasi Program
Bidang Irigasi

dengan pemilihan daerah prioritas yang selektif dan penajaman kegiatan berorientasi hasil sehingga berdampak langsung pada pembangunan daerah dan pencapaian target nasional. Sesuai dengan hasil kesepakatan Multilateral Meeting, ditetapkan lokasi prioritas (lokpri) tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani sejumlah 319 Pemda yang tersebar di 31 Provinsi dan 288 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Lokpri tematik tersebut menjadi semesta bagi lokpri bidang pendukungnya, sehingga tidak semua Pemda dapat mengusulkan DAK Fisik Bidang Irigasi TA 2022 dan meng-input data usulan dalam aplikasi KRISNA meskipun telah menyelesaikan proses verifikasi awal pada akhir bulan Maret s.d. Mei 2021.



Kementerian PUPR sebagai salah satu institusi yang berwenang atas penyelenggaraan infrastruktur di Indonesia memiliki andil dalam menyuksekan penyelenggaraan infrastruktur daerah, dan secara spesifik memiliki tugas dan fungsi

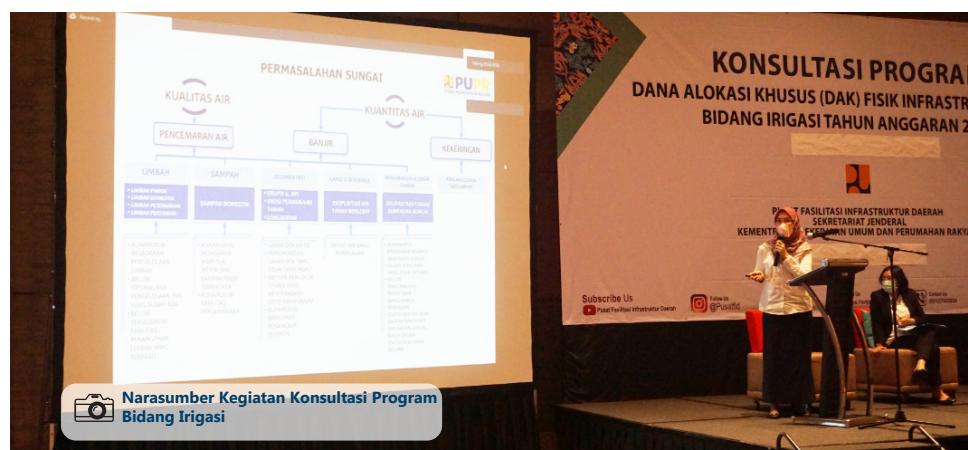
(tusi) untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kementerian PUPR selaku kementerian teknis memiliki peran dalam



pengalokasian DAK Fisik TA 2022, dimulai dari perumusan kebijakan DAK, pengusulan kegiatan oleh Pemda, penilaian data teknis, penilaian awal usulan rencana kegiatan oleh Pemda, penilaian sinkronisasi dan harmonisasi, serta penilaian rencana kegiatan setelah ditetapkannya alokasi DAK Fisik pada Bulan Oktober 2021.

Berdasarkan RUU APBN TA 2022 ditetapkan total alokasi DAK Fisik Bidang Irigasi TA 2022 sebesar Rp 1,5 T yang tersebar di 247 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dilihat dari sebarannya, Wilayah Barat (Sumatra) memperoleh total alokasi sebesar Rp 327,19 M, disusul Wilayah Tengah (Jawa dan Kalimantan) sebesar Rp 655,48 M, dan Wilayah Timur (Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua) sebesar Rp 517,33 M.

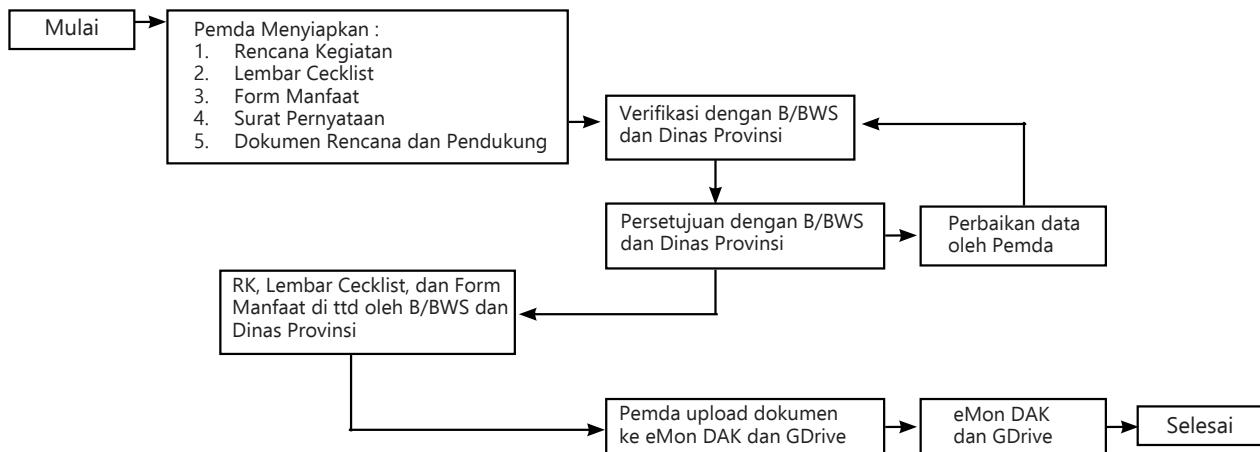
Sehubungan dengan telah ditetapkannya alokasi DAK Fisik



Bidang Irigasi TA 2022, maka Kementerian PUPR (dalam hal ini Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) c.q. Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air) menyelenggarakan Konsultasi Program Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik Bidang Irigasi TA 2022. Konsultasi Program dilaksanakan secara tatap muka dalam 3 (tiga) gelombang penyelenggar-

an (25 Oktober s.d. 11 November 2021) dengan mengundang lebih kurang 34 BBWS/BWS Kementerian PUPR dan 247 Dinas PUPR Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

- Gelombang I/Wilayah Barat, diselenggarakan selama tiga hari pada tanggal 25 s.d. 28 Oktober 2021 di Hotel Novotel Tange-



rang, Tangcity Superblock, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, RT. 001/RW. 005, Babakan, Tangerang, Tangerang City, Banten 15117 dengan mengundang 10 BBWS/BWS dan 63 Pemda dalam lingkup se-Pulau Sumatera.

b. Gelombang II/Wilayah Tengah, diselenggarakan selama tiga hari pada tanggal 1 s.d. 4 November 2021 di Hotel Aston Cirebon Hotel & Convention Center, Jl. Brigjend Dharsono By Pass No. 12C, Kertawinangun, Kedawung, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132 dengan mengundang 19 BBWS/BWS dan 101 Pemda dalam lingkup se-Pulau Jawa dan Kalimantan.

c. Gelombang III/Wilayah Timur, diselenggarakan selama tiga hari pada tanggal 8 s.d. 11 November 2021 di Hotel Novotel Tangerang, Tangcity Superblock, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, RT. 001/RW. 005, Babakan, Tangerang, Tangerang City, Banten 15117 dengan mengundang 12 BBWS/BWS dan 83 Pemda dalam lingkup se-Pulau Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Sebelumnya telah dilaksanakan Kick Off Meeting Konsultasi Pro-



gram DAK Fisik TA 2022 pada 7 Oktober 2021, dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan RK DAK Fisik Bidang Irigasi TA 2022 pada 8 Oktober 2021 secara daring.

Secara umum, Konsultasi Program terdiri atas sambutan pembukaan oleh Kepala PFID yang dilanjutkan dengan sesi panel oleh narasumber dari Kementerian PUPR, kemudian sesi desk berupa pembahasan teknis terkait kesiapan dan kesesuaian RK DAK Fisik Bidang Irigasi TA 2022. Desk dilakukan secara staging/berjenjang untuk semua usulan kegiatan dengan mekanisme sebagai berikut:

Sebanyak 212 Pemda (85,8 %) telah menyelesaikan pembahasan

RK pada kesempatan tersebut, dengan rincian: 1) Wilayah Barat: 52 Pemda (82,5 %); 2) Wilayah Tengah: 91 Pemda (90,1 %); dan 3) Wilayah Timur: 69 Pemda (83,1 %), menyisakan 35 Pemda yang masih belum menyelesaikan pembahasan RK, dengan spesifik permasalahan:

- Belum selesai pelaksanaan survei e-PAKSI, khususnya untuk daerah irigasi yang diusulkan baik itu bersifat baselining maupun updating. Sebagian besar Pemda umumnya baru selesai melaksanakan PAI tanpa adanya penilaian IKSI.
- Usulan yang tidak sinkron dengan hasil e-PAKSI dan/atau tanpa dilengkapi readiness criteria yang matang.



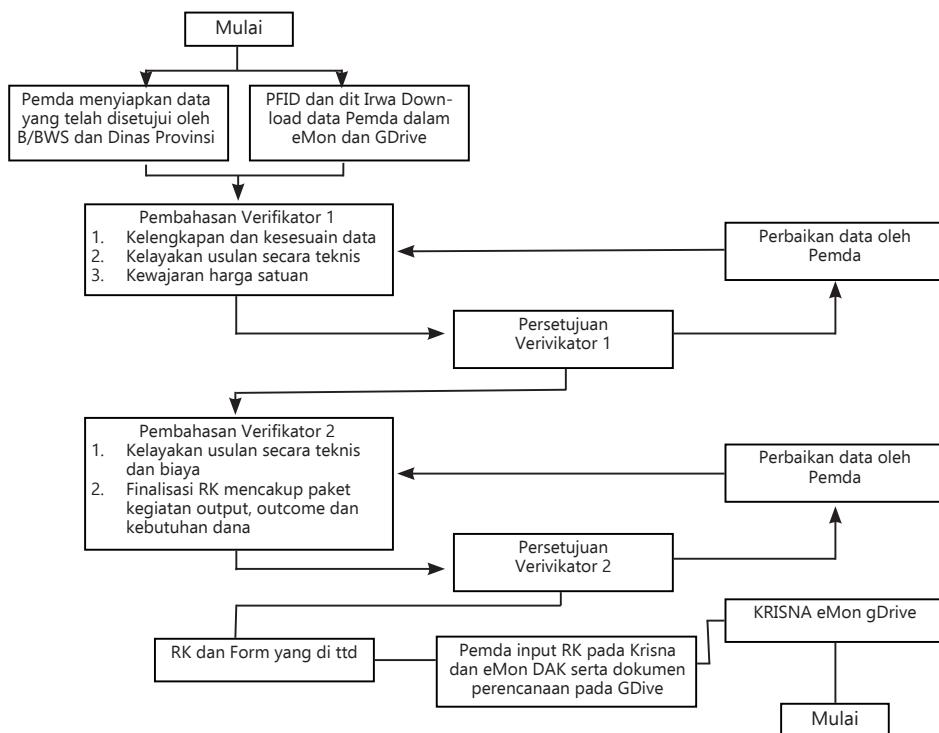
Sehubungan dengan masih adanya Pemda yang belum menyelesaikan pembahasan RK DAK Fisik Bidang Irigasi TA 2022 pada forum Konsultasi Program, maka dilaksanakanlah Pasca Konsultasi Program sebagai forum perpanjangan waktu bagi Pemda untuk menyelesaikan pembahasan RK. Acara diselenggarakan selama 3 hari mulai dari 22 s.d. 24 November di Hotel Grand Zuri BSD City, Jl. Pahlawan Seribu Kavling Ocean Walk Blok CBD, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten dengan peserta terdiri atas 19 BBWS/BWS dan 35 Dinas PUPR Provinsi/Kabupaten/Kota.

Hasil pembahasan ini selanjutnya menjadi dasar bagi Pemda dalam input perbaikan data usulan dalam aplikasi KRISNA untuk kemudian diberikan status penilaian



oleh sektor dan K/L, dengan tahapan: 1) Pemda input data usulan dalam aplikasi KRISNA sesuai dengan dokumen RK manual yang telah disetujui saat verifikasi, termasuk di dalamnya kegiatan penunjang; 2) Konfirmasi usulan oleh Pemda; 3) Lock usulan oleh Pem-

da; 4) Approval usulan oleh Pusat; 5) Lock approval usulan oleh Pusat; 6) Sign RK oleh Pemda; dan 7) Sign RK oleh Pusat. Status per 18 Desember 2021, penilaian RK dalam aplikasi KRISNA untuk pemda penerima DAK Fisik Bidang Irigasi TA 2022, tercatat:



No.	Menu Kegiatan	Pagu Alokasi (Rp)	Pagu RK KRISNA (Rp)
1	Pembangunan Jaringan Irigasi	133.099.166.173	109.767.256.773
2	Peningkatan Jaringan Irigasi		395.038.517.713
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	1.340.400.833.827	877.177.767.473
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	26.500.000.000	25.599.999.999
5	Penunjang	-	66.430.514.106
Total		1.500.000.000.000	1.474.014.056.064

Rekapitasi Pagu Alokasi Terhadap RK KRISNA DAK Fisik Bidang Irigasi TA 2022

- a. 249 Pemda (100 %) telah melakukan lock (Kab. Bandung Barat dan Kab. Jayawijaya tidak memperoleh alokasi DAK Fisik Bidang Irigasi TA 2022 namun tetap melakukan lock usulan dalam aplikasi KRISNA).
- b. 247 (100 %) Pemda telah lock approval oleh Pusat.
- c. 247 (100 %) Pemda telah sign RK.
- d. 247 (100 %) Pemda status RK telah sign Pusat.

Berdasarkan hasil rekapitulasi diperoleh total pagu RK yang disetujui sebesar Rp 1.474.014.056.064 (98,3 %), terdapat selisih pagu alokasi (Rp 1,5 T) terhadap persetujuan RK sebesar Rp 25.985.943.936 (1,7 %) dikarenakan adanya 11 Pemda yang tidak memanfaatkan sebagian alokasinya, yaitu: 1) Prov. Jawa Barat; 2) Prov. Sulawesi Barat; 3) Prov. Kalimantan Timur; 4) Kab. Gorontalo; 5) Kab. Hulu Sungai Tengah; 6) Kab. Indragiri Hilir; 7) Kab. Serang; 8) Kab. Kep. Mentawai; 9) Kab. Kayong Utara; 10) Kab. Luwu Timur; dan 11) Kab. Merauke.

Pemda yang telah menyelesaikan tahapan penyusunan RK diharapkan dapat segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa tanpa harus menunggu kepastian DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Selaras dengan hal tersebut, Pemda dapat meningkatkan koordinasi dengan Bappeda dan Bakeuda terkait administrasi keuangan daerah serta APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dalam rangka reviu APIP. Perlu disiapkan pula skenario percepatan proyek untuk menyiasati kemungkinan terjadinya keterlambatan progres di lapangan nantinya. Hal-hal tersebut di atas perlu menjadi perhatian Pemda dalam rangka menekan potensi gagal salur DAK Fisik Bidang Irigasi TA 2022 *



PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN (RK) DAK FISIK BIDANG JALAN DAN JEMBATAN TA. 2022

Oleh : Brigitta Yolanda
Robby Hidayat

Berdasarkan hasil dari kegiatan Sinkronisasi Harmonisasi dan ditetapkannya Alokasi DAK Bidang Jalan dan Jembatan TA. 2022, maka Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah mengadakan Kegiatan Konsultasi Program DAK Bidang Jalan dan Jembatan TA. 2022 agar penyusunan rencana kegiatan bidang jalan dan jembatan lebih terarah dan sesuai dengan aturan yang ada. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 gelombang yaitu 25-28 Oktober 2021 di Bogor, 1-4 November 2021 di Cirebon, 8-11 November 2021 di Tangerang. Namun masih ada daerah yang belum menye-



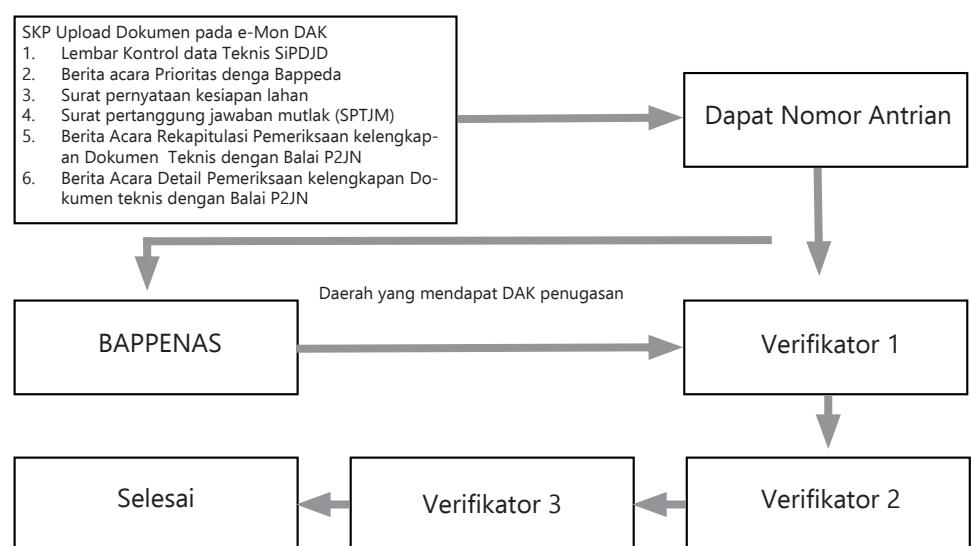
lesaikan penyusunan Rencana Kegiatan dari penyelenggaraan Konsultasi Program di atas, maka diadakan kegiatan Pasca Konsultasi Program DAK Bidang Jalan

dan Jembatan TA. 2022 sebanyak 2 gelombang yang diadakan pada 29 November - 3 Desember 2021 di Tangerang dan 6-10 Desember 2021 di Jakarta.



Kegiatan Konsultasi Program DAK Fisik Bidang Jalan dan Jembatan TA. 2022 ini terdiri atas sambutan dan pembukaan dari Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Narasumber dari Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Bidang Jalan dan Jembatan dan desk antara SKPD dan Verifikator. Dalam acara ini Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah mengundang Kementerian PPN/Bappenas untuk membahas prioritas penanganan pada DAK Penugasan. DAK Fisik Bidang Jalan TA. 2022 sendiri mendapatkan slot untuk ketiga tematik pada DAK Penugasan. Acara ini dilakukan secara online dan offline, hari per-

tama dan kedua desk diprioritaskan untuk SKPD yang datang langsung (offline) setelahnya dilanjutkan dengan online. Agar berjalan dengan tertib, maka SKPD yang dapat melanjutkan verifikasi desk adalah SKPD yang sudah mendapatkan nomor antrian saat mengisi dokumen administrasi pada aplikasi e-Monitoring DAK. Mekanisme acara Konsultasi Program sebagai berikut:



Mekanisme Konsultasi Program DAK Bidang Jalan dan Jembatan TA.2022

**Rekapitulasi Pagu Alokasi
terhadap RK KRISNA DAK Fisik Bidang Jalan dan Jembatan**

RK	Jumlah Daerah Penerima Alokasi	Pagu Alokasi	Pagu RK Krisna	Selisih	Keterangan
Reguler	491	7.298.810.091.000	7.245.975.902.062	52.834.188.938	3 Pemda tidak menyelesaikan RK yaitu (Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tuban)
Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Meningah	81	794.600.662.000	794.009.841.924	590.820.076	-
Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan	249	2.700.880.000.000	2.689.169.809.416	11.710.190.584	1 Pemda tidak menyelesaikan RK yaitu (Kabupaten Musi Banyuasin)
Tematik Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua	75	1.370.876.064.000	7.975.952.000	0	-

Sebanyak 248 Pemda (49%) telah menyelesaikan pembahasan Rencana Kegiatan dengan rincian: 1) Wilayah Barat: 98 Pemda (64% dari total pemda terundang); 2) Wilayah Tengah: 99 Pemda (57% dari total pemda terundang); 3) Wilayah Timur: 51 Pemda (29% dari total pemda terundang). Sehingga menyisakan 254 Pemda (51%) yang masih belum menyelesaikan pembahasan Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan TA. 2022. Kendala yang ditemui saat proses penyusunan RK ini adalah:

1. Pemda belum menyelesaikan asistensi dengan Balai P2JN;
2. Pemilihan ruas untuk alokasi DPR;
3. Usulan yang dipilih tidak sesuai dengan hasil SIMONI dan prioritas yang dimasukkan ke dalam RK tidak sesuai dengan urutan BA Prioritas bersama Bappeda;
4. Revisi desain dan data teknis.

Hasil pembahasan ini selanjutnya menjadi dasar bagi pemda dalam input data RK di aplikasi KRISNA untuk kemudian diberikan status penilaian oleh Kementerian/Lembaga, dengan tahapan:

1. Pemda input data pada aplikasi KRISNA sesuai dengan dokumen RK manual yang telah disetujui saat verifikasi;
2. Konfirmasi usulan oleh Pemda;
3. Lock usulan oleh Pemda;
4. Approval oleh Pusat;
5. Lock approval oleh pusat;
6. Sign RK oleh Pemda;
7. Sign RK oleh pusat.

Status per 18 Desember 2021, penilaian RK dalam aplikasi KRISNA untuk Pemda penerima DAK Fisik Bidang Jalan dan Jembatan TA. 2022 dirangkum dalam tabel

Dalam rangkaian penyusunan Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan TA. 2022 ini sem-

pat mengalami kendala lain yaitu masih banyak pemerintah daerah yang tidak memperbaiki volume target penanganan pada aplikasi KRISNA, kemudian juga ada yang terlewat dalam melakukan konfirmasi daerah pada aplikasi tersebut. Namun kendala tersebut pada akhirnya dapat teratasi dengan adanya koordinasi antara PFID, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah yang bersangkutan. Sehingga secara garis besar, penyusunan Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan TA. 2022 dapat selesai dengan tepat waktu. Pemerintah daerah yang telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja DAK Bidang Jalan dan Jembatan diharapkan segera melakukan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan RK pada aplikasi KRISNA yang telah ditandatangani digital oleh PFID agar bisa mulai pelaksanaan konstruksi *



Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Nguwok

MONITORING DAN EVALUASI DAK BIDANG IRIGASI KABUPATEN JEPARA TA 2021

Oleh: Nova Dorma Sirait
Irma Rahmawati
Ganang Saputro

DAK Bidang Irigasi dalam RPJMN tahun 2020 - 2024 mendukung 2 dari 7 Prioritas Nasional, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1) dan Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5).

Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi Tahun 2021, khususnya di

Kabupaten Jepara mendapatkan alokasi sebesar Rp 28,85 miliar, untuk pelaksanaan pekerjaan fisik sebesar Rp 27,7 miliar dan pekerjaan penunjang sebesar Rp 1,15 miliar. Pekerjaan fisik di Kabupaten Jepara terdapat dua menu kegiatan, yaitu Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Rp 23,8 miliar) dan Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir (Rp 3,9 miliar). Rehabilitasi Jaringan Irigasi untuk Tahun 2021

dilaksanakan di 15 lokasi, yaitu D.I. Dermolo, D.I. Wadang, D.I. Sowan Lor, D.I. Polorejo, D.I. Waru, D.I. Bate, D.I. Dung Pabrik, D.I. Gagel, D.I. Belik, D.I. Sebambyang, D.I. Nguwok, D.I. Pakis/Persil, D.I. Mojowali, D.I. Tlaseh, dan D.I. Kedung Bende. Sedangkan untuk menu kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir dilaksanakan di Sungai Gelis WS Wiso Gelis.



Rapat Koordinasi di Kantor Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jepara

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) melalui Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi TA 2021 pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 di Kabupaten Jepara.

Tim kunjungan monitoring dan evaluasi terdiri atas Kepala Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air PFID beserta jajaran tim dan bersama beberapa anggota dari Direktorat Sungai dan Pantai Ditjen SDA, serta didampingi oleh perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana. Kunjungan dilakukan dengan maksud untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Irigasi Tahun 2021 di Kabupaten Jepara khususnya pekerjaan Pembangunan Infrastruk-

tur Pengendali Banjir Sungai Gelis (WS Wiso Gelis) dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan.

Kedatangan tim di Dinas PUPR Kabupaten Jepara diterima oleh Kepala Dinas beserta jajaran tim. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi diawali dengan diskusi di ruangan Kepala Dinas. Berdasarkan hasil

diskusi, diketahui bahwa Kabupaten Jepara selama tahun 2021 mengalami kendala pada saat proses penawaran harga dalam lelang dan kendala saat pelaksanaan O & P dikarenakan dana APBD Kabupaten Jepara tidak mampu mencukupi. Selain itu, curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan beberapa area di Kabupaten Jepara mengalami banjir.



Rapat Koordinasi di Kantor Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jepara



Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan di D.I. Nguwok yang merupakan penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi TA 2021 menu kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi. Nilai alokasi DAK D.I. Nguwok sebesar Rp. 3,195 miliar dengan luasan outcome 213 hektar. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan ditemukan beberapa hal yang menjadi perhatian pada D.I Nguwok yaitu:

1. D.I. Nguwok terletak di Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.
2. Output pekerjaan di lapangan berupa rehabilitasi bangunan bendung 1 buah dan saluran sekunder 530 meter.
3. Realisasi progres fisik rehabilitasi D.I. Nguwok tahun 2021 sudah mencapai 100%.
4. Saluran sekunder yang direhabilitasi masih kurang rapih dalam pengeraannya, terutama dalam pengeraaan plesteran.
5. Luapan dari saluran pembuang permukiman warga masuk ke dalam saluran irigasi.
6. Terdapat banyak sedimentasi di hulu bendung.



Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Nguwok

7. Lereng di samping saluran sekunder rawan longsor, terutama saat musim hujan.

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang ditemukan, maka tim monitoring dan evaluasi PFID merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu dilaksanakan pekerjaan perbaikan, terutama pekerjaan plesteran di sepanjang saluran sekunder.
2. Kegiatan O & P harap dilaksanakan, hal ini karena banyaknya endapan di hulu bendung

dan saluran yang terbawa dari hulu sungai. Selain itu, manual O & P D.I. Nguwok harap segera disiapkan.

3. Petugas pintu air harap selalu siaga ketika musim penghujan.
4. Harap ditinjau kembali terkait adanya saluran pembuang dari permukiman warga supaya tidak masuk ke dalam saluran irigasi.
5. Pelaksanaan e-PAKSI harap segera dilaksanakan untuk mengetahui nilai IKSI D.I. Nguwok setelah pekerjaan rehabilitasi.

Dari D.I. Nguwok, kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi lokasi Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Gelis yang bersumber dari DAK Bidang Irigasi TA 2021. Nilai alokasi DAK Sungai Gelis sebesar Rp. 3,9 miliar dengan outcome kegiatan 80 hektar. Pada kunjungan ini ditemukan beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Gelis WS Wiso Gelis terletak di Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.
2. Output pekerjaan yang disulaskan berupa pembangunan tanggul sungai sepanjang 1.110 meter.
3. Sepanjang aliran sungai terdapat banyak batu.
4. Timbunan tanah di belakang tanggul sungai masih kurang padat, serta ada beberapa spot yang timbunannya tidak ada.
5. Posisi pipa air untuk lahan pertanian warga, menyilang di beberapa spot tanggul.
6. Lokasi pelaksanaan pembangunan tanggul sungai terletak di sekitar kawasan wisata.
7. Pemasangan pipa suling di sepanjang tanggul sungai masih kurang rapi.

Menanggapi temuan catatan tersebut, tim monitoring dan evaluasi PFID bersama tim dari Direktorat Sungai dan Pantai, Ditjen SDA merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengantisipasi adanya laporan eksplorasi batu di sepanjang sungai, dokumentasi ketika pelaksanaan kegiatan harap dilengkapi.
2. Perlu adanya saluran drainase di belakang tanggul sungai, hal ini untuk mengantisipasi limpasan air dari permukiman atau lahan perkebunan/pertanian warga.



3. Pipa air untuk lahan pertanian warga yang menyilang di sepanjang tanggul perlu dirapikan posisinya.
4. Timbunan tanah di belakang tanggul perlu dipadatkan.

Penyelenggaraan kegiatan DAK Bidang Irigasi TA 2021 pada Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Nguwok dan Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Gelis di Kabupaten Jepara secara keseluruhan telah berjalan cukup baik, sekalipun masih perlu sedikit per-

baikan. Laporan secara keseluruhan untuk pelaksanaan DAK Bidang Irigasi TA 2021 di Kabupaten Jepara per tanggal 21 Desember 2021 untuk progres keuangan sebesar 55,78% dan progres fisik sebesar 98,86%. Dengan termonitornya pekerjaan DAK Bidang Irigasi TA 2021 diharapkan kebijakan-kebijakan yang dirumuskan pusat dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat *



Ruas Jalan DAK di Kabupaten Klungkung

MONITORING DAN EVALUASI BIDANG JALAN DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Oleh : Akram Yonda Putra,

Jalan merupakan prasarana penting transportasi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu wilayah dalam jangka panjang sehingga dalam pembangunannya perlu mempertimbangkan umur rencana yang tepat. Umur jalan yang sudah direncanakan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Agar dapat tetap mengakomodasi kebutuhan pergerakan dengan tingkat layanan tertentu maka perlu dilakukan suatu usaha untuk menjaga kualitas layanan jalan,

Setiap tahunnya Pemerintah

mengeluarkan alokasi DAK untuk membantu Pemerintah Daerah menjaga kondisi jalan. Penilaian kondisi jalan perlu dilakukan secara periodik baik struktural maupun nonstruktural. Agar jalan dapat tetap mengakomodasi kebutuhan pergerakan dengan tingkat layanan tertentu maka perlu dilakukan suatu usaha untuk menjaga kualitas layanan jalan, dimana salah satu usaha tersebut adalah evaluasi kondisi permukaan jalan.

Penilaian kinerja pelaksanaan DAK dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Hasil penilaian kinerja pelaksanaan DAK akan dijadikan salah satu pertim-

bangan dalam program pembinaan penyelenggaraan DAK.

Salah satu tugas dan fungsi Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Bidang Jalan ialah monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jalan daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut PFID Bidang Jalan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan infrastruktur terutama jalan dan jembatan yang menggunakan sumber dana DAK Bidang Jalan TA.2020 & TA.2018 (N-1 dan N-3) untuk ruas jalan Kabupaten Klungkung dan kabupaten Badung di Provinsi Bali. Pada kegiatan monitoring dan evaluasi ini PFID Bidang Ja-



Kegiatan Monev Bidang Jalan di Kab. Klungkung



Ian meninjau beberapa parameter untuk mengukur pelaksanaan DAK Bidang Jalan. Adapun parameter yang di tinjau pada kegiatan monitoring dan evaluasi kali ini ialah :

1. Kemiringan Badan Jalan
2. Kekuatan Badan Jalan (untuk perkerasan beton)
3. Kemiringan Bahu Jalan
4. Kekuatan Bahu Jalan (untuk bahu dengan perkerasan beton)
5. Ketersediaan Drainase (Kedalaman & Lebar Drainase)
6. Ketersediaan Marka (Jenis marka dan posisi marka)
7. Ketersediaan kelengkapan Road Safety (Guard rail, rambu, zoss, dll)

Parameter tersebut dapat merepresentasikan pelaksanaan kegiatan

an DAK Bidang Jalan pada masing masing daerah. Untuk ruas jalan yang menggunakan dana DAK TA.2018 (N-3) maka ditambahkan dengan melakukan wawancara terhadap pengguna jalan dan warga sekitar mengenai aspek kebermanfaatan baik manfaat secara ekonomi maupun manfaat sosial serta dari segi koneksi jalan yang mendukung.

Dikarenakan masih dalam kondisi pandemik Covid 19, maka monitoring dan evaluasi pada tahun 2021 dilakukan tetap dengan memperhatikan protokol Kesehatan yang berlaku dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dan membatasi jumlah orang pada kegiatan monitorin dan evaluasi ini.. Adapun daerah kabupaten Klungkung dan Kabupaten Badung dipilih karena Kabupaten

Badung merupakan kabupaten dengan tingkat kemampuan tertinggi dan kabupaten Klungkung memiliki wilayah kepulauan Nusa penida. Kedua daerah tersebut menunjang koneksi jalan dari segi tematik Pariwisata, dimana tematik tersebut salah satu yang amat terdampak dari pandemic Covid 19 ini.

Adapun hasil dari dilakukannya monitoring dan evaluasi oleh PFID bidang jalan beserta hasil pemerintahannya, sebagai berikut :

1. Kemiringan badan jalan masih belum sesuai dengan standar atau desain yang direncanakan. Meskipun sudah mulai ada perbaikan untuk Sebagian kecil paket kegiatan pada tahun N yang mulai memenuhi standar
2. Bahu jalan belum ada atau masih belum sesuai dengan standar



Ruas Jalan DAK di Kabupaten Klungkung

atau desain yang direncanakan baik dari lebar, mutu perkerasan, kemiringan, maupun tebal serta penempatannya juga masih terlihat beberapa ruas yang bahunya belum rapih saat pengerjaannya.

3. Drainase pada Sebagian ruas yang di cek tidak tersedia atau masih belum terhubung dengan drainase regional/perkotaan terutama pada kabupaten klungkung dikarenakan elvasi tanah yang bervariasi
4. Sebagian besar Marka dan Rambu jalan sudah terpasang sesuai dengan standar
5. Belum maksimalnya kegiatan pemeliharaan rutin baik untuk pemeliharaan rutin dari pemda

dikarenakan keterbatasan anggaran maupun tidak maksimalnya pekerjaan yang dilakukan oleh warga sekitar.

6. Untuk pekerjaan paket yang dikerjakan pada tahun 2021 (Tahun N) dan tahun 2020 (N-1) sudah cukup baik dan dirasakan oleh masyarakat sekitar baik untuk menunjang pariwisata, akses logistic, maupun kegiatan ekonomi lainnya yang ada di kabupaten Klungkung dan Kabupaten Badung
7. Sudah muncul defect atau kerusakan pada jalan jalan yang tertangani tahun N-3 maup

Dari hasil evaluasi tersebut maka diharapkan agar pada program DAK tahun berikutnya daerah dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan dokumen kontrak yang ditetapkan serta tetap mengikuti standar dan pedoman teknis yang berlaku agar pelaksanaan program DAK semakin baik *

KUNJUNGAN KOORDINASI DAK BIDANG SANITASI DAN PERUMAHAN DI KOTA MATARAM

Oleh : Leviana Okvianty
Pujiati Rahayu



Koordinasi di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram

Kunjungan koordinasi diawali dengan pertemuan di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 yang dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, kemudian dilanjutkan penyampaian maksud dan tujuan kunjungan oleh Subkoordinator Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, serta diskusi terkait penyelenggaraan DAK Bidang Sanitasi dan Perumahan di Kota Mataram. Beberapa poin penting yang diperoleh dari koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terkait pengusulan DAK 2022 Bidang Perumahan dan Permukiman, Dinas Kota Mataram mengurangi usulan unit rumah untuk mengatasi masalah terkait ketentuan dana pendamping sebesar Rp 15 Juta Rupiah;

2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram sedang menyiapkan dokumen RP-3KP sebagai amanah dari Dirjen Perumahan. Dokumen RP3KP tersebut yang akan menjadi acuan untuk pengusulan program-program terkait perumahan;
3. Pemerintah daerah mengharapkan agar kebijakan DAK Per-

mahan dan Permukiman disampaikan di awal tahun sebelum pengusulan dan dapat konsisten tidak berubah-ubah. Kemudian syarat lembar identifikasi keswadayaan cukup mempersulit penda;

4. Pemerintah daerah belum melakukan pendataan immediate outcome DAK TA 2021.



A. TINJAUAN LAPANGAN

1. DAK Bidang Sanitasi TA. 2020 dan TA 2021

a Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya (TA. 2020)

Tinjauan lapangan DAK Bidang Sanitasi TA. 2020 dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Desember 2021 di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya. Program penyelenggaraan DAK Sanitasi TA. 2020 yang ditinjau dapat dilihat di bawah ini

Program/Kegiatan Bidang Sanitasi

1	Lokasi Kunjungan	Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya
2	Program/Kegiatan/Paket	Pembangunan tangki septic skala komunal (5-10 KK)
3	Target Outcome	125 Jiwa
4	Target Output	60 unit
5	Cara Pengadaan	Swakelola
6	Jenis DAK	Reguler
7	Pagu DAK	Rp 390.000.000

Poin hasil tinjauan lapangan antara lain :

- Jumlah Tangki Septik Komunal yang terbangun sesuai dengan jumlah yang diusulkan adalah 6 unit TS Komunal dan masing-masing unit tersambung ke 10 rumah sehingga total rumah yang tersambung adalah 60 rumah sesuai RK.
- Ukuran masing-masing 2,5 x 2,5 x 5 meter.

- Tangki Septik tersebut diletakkan di bawah jalan Kelurahan maupun di pekarangan rumah warga.
- KPP sudah terbentuk.

b Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya (TA. 2021)

Tinjauan lapangan DAK Bidang Sanitasi TA. 2021 dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Desember 2021 di Kelurahan Bertais, Kec. Sandubaya. Program penyelenggaraan DAK Sanitasi TA. 2021 yang ditinjau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Program/Kegiatan Bidang Sanitasi

1	Lokasi Kunjungan	Kelurahan Bertais, Kec. Sandubaya
2	Program/Kegiatan/Paket	Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 25 KK
3	Target Outcome	125 Jiwa
4	Target Output	1 unit IPAL, 25 Sambungan Rumah
5	Cara Pengadaan	Swakelola
6	Jenis DAK	Penugasan
7	Pagu DAK	Rp 336.972.000

Poin hasil tinjauan lapangan antara lain

- IPAL di Kelurahan Bertais tersebut memiliki kapasitas bak sedimentasi 3 x 1,5 x 4 m dan bak filtrasi/ABR 4 x 3 x 3 m. Jumlah SR yang tersambung se-

- suai dengan output yang ditargetkan yaitu 32 rumah
- IPAL menggunakan filter botol aqua pada bak An-aerobic Filter serta sebelum outlet menggunakan arang untuk desinfeksi.
 - Pada IPAL sudah terdapat 2 pipa hawa untuk me-ngeluarkan gas metana
 - Secara aspek social, KSM dan KPP dekat dengan masyarakat dan banyak masyarakat sekitar daerah pelayanan yang belum tersambung berminat untuk dilayani juga.
 - Berdasarkan catatan dari pengelola IPAL, masya-rakat belum membayar retribusi.

c Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya (TA. 2021)

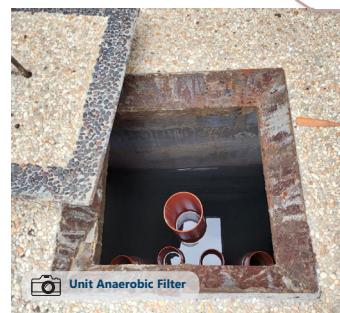
Tinjauan lapangan DAK Bidang Sanitasi TA. 2021 dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Desember 2021 di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya. Pro-gram penyelenggaraan DAK Sanitasi TA. 2021 yang ditinjau dapat dilihat di bawah ini.

Program/Kegiatan Bidang Sanitasi

1	Lokasi Kunjungan	Kelurahan Mandalika, Kecamatan Gianyar
2	Program/Kegiatan/ Paket	Pengembangan SR
3	Target Outcome	125 Jiwa
4	Target Output	1 unit IPAL, 25 unit SR
5	Cara Pengadaan	Swakelola
6	Jenis DAK	Penugasan
7	Pagu DAK	Rp 336.000.000

Poin hasil tinjauan lapangan antara lain :

- IPAL di Kelurahan Mandalika tersebut memiliki ka-pasitas $2,8 \times 12 \times 2,55$ m. Jumlah SR yang tersam-bung melebihi dari target output yaitu 37 SR
- IPAL belum berfungsi karena masih ada perbaikan jalan di sekitar IPAL, sehingga pipa persil masih belum tersambung ke rumah-rumah warga, namun pipa primer dan sekunder sudah terpasang
- Bak control and grease trap ada di rumah-rumah warga
- Pipa hawa sudah terpasang sebanyak 2 buah
- Berdasarkan catatan dari pengelola IPAL, masya-rakat rencananya akan membayar retribusi untuk pengelolaan IPAL.



d Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya (TA. 2021)

Tinjauan lapangan DAK Bidang Sanitasi TA. 2021 dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Desember 2021 di Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya. Program penyelenggaraan DAK Sanitasi TA. 2021 yang ditin-jau dapat dilihat di bawah ini.

Program/Kegiatan Bidang Sanitasi

1	Lokasi Kunjungan	Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya
2	Program/Kegiatan/ Paket	Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK
3	Target Outcome	125 Jiwa
4	Target Output	1 unit IPAL, MCK, dan 25 SR
5	Cara Pengadaan	Swakelola
6	Jenis DAK	Penugasan
7	Pagu DAK	Rp 400.000.000

Poin hasil tinjauan lapangan antara lain :

- IPAL di Kelurahan Turida tersebut terletak di halaman masjid. Memiliki kapasitas 8 x 3,1 x 3 m. Unit Sambungan Rumah yang tersambung sejumlah 25 SR serta 1 masjid.
- MCK terdapat 2 bilik WC, tempat wudhu, dan binatu 2 ruang.
- IPAL belum tersambung ke rumah-rumah, namun sudah selesai pembangunan, sedang proses finishing pembersihan lokasi IPAL.
- Berdasarkan catatan dari pengelola IPAL/KPP, masyarakat akan membayar retribusi untuk pengelolaan IPAL sebanyak Rp 5000/rumah.



Pengumpulan data DAK Bidang Sanitasi TA 2021 di Kota Mataram dilakukan pada 2 Kelurahan dengan total responden adalah 6 orang dengan rincian 3 orang dari penerima bantuan Tangki Septik Komunal dan 3 orang penerima bantuan sambungan rumah ke IPAL, seluruhnya dari Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya. Adapun hasil survei dapat dilihat pada tabel berikut:



Hasil Survei DAK Bidang Sanitasi TA 2021 Kota Mataram

No.	Penerima DAK	Pekerjaan	Kelurah-an	Kecamatan	Digunakan satu Rumah Tangga	Leher Angsa (Closet jong-kok / duduk)	Penyaluran Air Limbah ke fasilitas IPAL Komunal / Terpusat	Penyedotan/ pengelolaan Lumpur tinja	Pengelolaan			Pengelolaan
									Swadaya Masyarakat / Komuni-tas	Dinas (PUPR/ LH/Pem-da)	Pihak Swasta	
I. Pembangunan Tangki Septik Komunal / 2020												
1	Pupu Lembeh	Tidak bekerja	Bertais	Sandubaya	3	3	3	3	3			15
2	Sarimah	Pengupas bawang	Bertais	Sandubaya	3	3	3	3	3			15
3	Ramli	Buruh Tani	Bertais	Sandubaya	3	3	3	3	3			15
Rata-rata						3	3	3	3			15
II. Pembangunan IPAL Komunal / 2021												
4	Samah	Tidak bekerja	Bertais	Sandubaya	3	3	3	3	3			15
5	Sapri	Ojek	Bertais	Sandubaya	3	3	3	3	3			15
6	Fajri	Juru Pakir	Bertais	Sandubaya	3	3	3	3	3			15
Rata-rata						3	3	3	3			15

Dari data tabel di atas didapatkan nilai aspek mutu DAK Bidang Sanitasi di Kota Mataram sebesar 15 dari maksimal nilai 15. Jika dikonversi menjadi persentase didapatkan nilai sebesar 100% sehingga termasuk ka-

tegori baik. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan DAK Bidang Sanitasi di Kota Mataram berjalan dengan baik dan mutu yang dihasilkan juga baik.

1. DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TA 2021

a Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya

Tinjauan lapangan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya TA. 2021 dilaksanakan pada hari Senin, 20 Desember 2021. Program DAK Bidang Perumahan dan Permukiman yang ditinjau dapat dilihat di bawah ini.

Program/Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya TA 2021

1	Lokasi Kunjungan	Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya
2	Program/Kegiatan/Paket	Peningkatan Kualitas
3	Target Outcome	15 KK
4	Target Output	15 Unit
5	Cara Pengadaan	Swakelola
6	Jenis DAK	Penugasan
7	Pagu DAK	Rp 300.000.000

Poin hasil tinjauan lapangan antara lain :

- Target output pada RK dengan jumlah infrastruktur terbangun sudah sesuai yaitu 15 unit rumah;
- Kota Mataram merupakan daerah pasca gempa, sehingga atap rumah tidak menggunakan genteng, melainkan menggunakan spandek;
- Tidak ada kendala dalam kegiatan peningkatan kualitas di Kelurahan Selagalas, hanya proses perbaikan rumah belum 100% selesai. Ada beberapa rumah yang keramiknya belum terpasang

b Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram (TA.2021)

Tinjauan lapangan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman di Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram TA. 2021 dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Desember 2021. Program DAK Bidang Perumahan dan Permukiman yang ditinjau dapat dilihat di bawah ini.

Program/Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram TA. 2021

1	Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram	Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya
2	Peningkatan Kualitas	Peningkatan Kualitas
3	20 KK	15 KK
4	20 Unit	15 Unit
5	Swakelola	Swakelola
6	Penugasan	Penugasan
7	Rp 400.000.000	Rp 300.000.000

Poin hasil tinjauan lapangan antara lain :

- Target output pada RK dengan jumlah infrastruktur terbangun tidak sesuai;
- Dari 20 unit rumah yang ditargetkan, 18 unit rumah sudah selesai konstruksi, 1 unit rumah masih dalam proses konstruksi, dan 1 unit rumah bermasalah;
- 1 unit rumah yang bermasalah merupakan unit dengan nama penerima bantuan Bapak Suparto. Pada pelaksanannya, penerima bantuan tidak memperbaiki rumah utama melainkan memperbaiki bagian halaman rumah belakang sehingga pihak pemerintah daerah tidak mencairkan sisa uang ke penerima bantuan karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Kemudian, saat dilakukan kunjungan, yang menempati rumah bukanlah Bapak Suparto melainkan orang lain yang menempati rumah tersebut dengan status kontrak sudah tinggal selama 2 tahun. Solusi dari permasalahan pelaksanaan di unit rumah ini ialah pembuatan berita acara / justifikasi yang memuat kronologis pelaksanaan dari awal hingga komitmen dari Bapak Suparto untuk membangun sesuai spesifikasi dan juga setelah konstruksi akan ditinggali oleh Bapak Suparto dan tidak dikontrakkan.
- Atap rumah yang ditingkatkan kualitasnya tidak menggunakan genteng, melainkan menggunakan spandek;
- Swadaya masyarakat berkisar dari RP 5.000.000 - Rp 25.000.000

c Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang (TA. 2021)

Tinjauan lapangan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman di Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang TA. 2021 dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Desember 2021. Program penyelenggaraan DAK Perumahan dan Permukiman yang ditinjau dapat dilihat di bawah ini.

Program/Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang TA. 2021

1	Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram	Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang
2	Peningkatan Kualitas	Peningkatan Kualitas
3	20 KK	17 KK
4	20 Unit	17 Unit
5	Swakelola	Swakelola
6	Penugasan	Penugasan
7	Rp 400.000.000	Rp 340.000.000

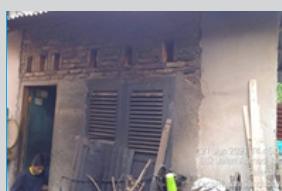
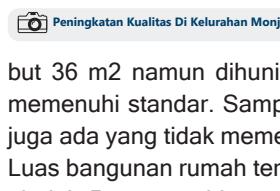
Poin hasil tinjauan lapangan antara lain :

- Target output pada RK dengan jumlah infrastruktur terbangun sudah sesuai;
- Rata-rata konstruksi selesai pada Bulan Oktober - November;
- Swadaya masyarakat berkisar dari Rp 5.000.000 - Rp 15.000.000

Pengumpulan data DAK Bidang Perumahan dan Permukiman TA 2021 di Kota Mataram dilakukan pada 3 Kelurahan dengan total responden adalah 15 orang dengan rincian 5 orang dari Kelurahan Selagalas, 5 orang dari Kelurahan Mataram Timur, dan 5 orang dari Kelurahan Monjok Barat. Adapun hasil survei dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Survei DAK Bidang Perumahan dan Permukiman TA 2021 Kota Mataram

No	Penerima DAK	Pekerjaan	Lokasi		Indikator				Total
			Kelurahan	Kecamatan	Ketahanan Bangunan	Kecukupan Luas	Akses Air Minum	Akses Sanitasi	
Peningkatan Kualitas / 2021									
1	Sukaeni	Penjahit	Selagalas	Sandubaya	1	1	1	1	4
2	M Nur Cinta	Petani	Selagalas	Sandubaya	1	1	1	1	4
3	Saripah	Ibu Rumah Tangga	Selagalas	Sandubaya	1	1	1	1	4
4	Ahmad Yadi	Pedagang	Selagalas	Sandubaya	1	1	1	1	4
5	Rumilah	Pensiunan	Selagalas	Sandubaya	1	1	1	1	4
Rata-Rata					5	5	5	5	20
Peningkatan Kualitas / 2021									
1	Suparto	Pegawai	Mataram Timur	Mataram	0	0	0	0	0
2	Suryanto		Mataram Timur	Mataram	1	1	1	1	4
3	Farham Firdaus		Mataram Timur	Mataram	1	0	1	1	3
4	Rawiah		Mataram Timur	Mataram	1	1	1	1	4
5	Sirajudin		Mataram Timur	Mataram	1	1	1	1	4
Rata-Rata					4	3	4	4	15
Peningkatan Kualitas / 2021									
1	Rahman		Monjok Barat	Selaparang	1	0	1	1	3
2	Jalimah		Monjok Barat	Selaparang	1	1	1	1	4
3	Sakmah		Monjok Barat	Selaparang	1	1	1	1	4
4	Rasidi		Monjok Barat	Selaparang	1	1	1	1	4
5	Hartawan		Monjok Barat	Selaparang	1	1	1	1	4
Rata-Rata					5	4	5	5	19

Foto 0 %**Peningkatan Kualitas Di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya****Foto Tinjauan Lapangan****Foto 0 %****Foto Tinjauan Lapangan****Foto 0 %****Foto Tinjauan Lapangan****Peningkatan Kualitas Di Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram**

Parameter pertama adalah ketahanan bangunan dimana pada sampel yang dikunjungi terlihat bahwa secara umum ketahanan bangunannya layak dengan rincian kondisi atap semua rumah terbuat dari spandeks, dinding berupa tembok, dan lantainya ada yang menggunakan keramik, dan juga plur. Parameter kedua adalah kecukupan luas dimana pada sampel rumah di Kelurahan Mataram Timur ada yang tidak memenuhi persyaratan 7,2 m²/jiwa. Luas bangunan rumah tersebut

Peningkatan Kualitas Di Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang

but 36 m² namun dihuni oleh 6 orang sehingga tidak memenuhi standar. Sampel di Kelurahan Monjok Barat juga ada yang tidak memenuhi persyaratan 7,2 m²/jiwa. Luas bangunan rumah tersebut 28 m²/jiwa namun dihuni oleh 5 orang sehingga tidak memenuhi standar. Parameter ketiga adalah akses air minum, semua sampel yang dikunjungi akses air minumnya berasal dari PAM. Parameter keempat adalah akses sanitasi, semua sampel yang dikunjungi rumahnya memiliki toilet yang digunakan masing-masing rumah dan sudah memiliki tangka septik. Dari hasil survei di atas kemudian dilakukan rekapitulasi sehingga hasilnya sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Survei DAK Bidang Perumahan di Kota Mataram

No.	Lokasi		Output (Unit)	Sampel	Indikator				Total
	Penerima DAK	Pekerjaan			Ketahanan Bangunan	Kecukupan Luas	Akses Air Minum	Akses Sanitasi	
I. Pembangunan Tangki Septik Komunal / 2020									
1	Sandubaya	Selagalas	15	5	5	5	5	5	20
2	Mataram Timur	Mataram	20	5	4	3	4	4	15
3	Selaparang	Monjok Barat	17	5	5	4	5	5	19
Rata-rata				4,7	4	4,7	4,7	18,1	3

Dari data tabel di atas didapatkan nilai aspek mutu DAK Bidang Perumahan di Kota Mataram sebesar 18,1 dari maksimal nilai 20. Jika dikonversi menjadi persentase didapatkan nilai sebesar 90,5% sehingga termasuk kategori baik. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan DAK Bidang Perumahan di Kota Mataram berjalan dengan baik dan mutu yang dihasilkan juga baik *



DAK FISIK CADANGAN BIDANG SANITASI TA. 2021 UNTUK MENDUKUNG PENANGANAN PERSAMPAHAN DI KAWASAN SARBAGITA

Oleh : Rethon M. Canopy

Provinsi Bali terpilih sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang akan dilaksanakan pada bulan November 2021. Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan G20 baik dengan mempersiapkan infrastruktur fisik maupun kesiapan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah kondisi TPA Suwung yang sudah penuh dan timbulan sampah yang menimbulkan bau tidak sedap. TPA Suwung yang menerima sampah dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan sudah mencapai kapasitas maksimalnya dan direncanakan akan segera ditutup. Untuk menindaklanjuti kondisi ter-

sebut, dibutuhkan strategi jangka pendek dalam menangani permasalahan persampahan di Kawasan Sarbagita. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah penanganan sampah di hulu sehingga dapat mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA. Pada tahun 2021, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran tambahan berupa DAK Fisik Cadangan Bidang Sanitasi untuk membangun TPS3R di 4 (empat) kabupaten/kota dan revitalisasi TPS3R atau TPST yang sudah terbangun namun tidak berjalan dengan optimal, sebagai upaya penanganan persampahan di Kawasan Sarbagita. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 10/SE/Sj/2021, menu kegiatan DAK Fisik Cadangan Bidang Sanitasi terdiri atas:

- Pembangunan TPS3R Baru, dengan komponen kegiatan yaitu bangunan TPS3R, alat sortir sampah/Conveyor, alat pencacah sampah, alat komposting, motor sampah, mesin press plastik/hidrolik, mesin pengayak, alat pelet, alat pengering, alat pewaduhan yang terpilah, Black Soldier Fly (BSF), Biodigester, wadah pemilahan khusus, truk sampah kompaktor pengumpul sampah terpilah; dan
- Revitalisasi TPS3R/TPST Terbangun, dengan komponen kegiatan yaitu bangunan TPS3R/TPST, alat sortir sampah/Conveyor, alat pencacah sampah, alat komposting, motor sampah, mesin press plastik/hidrolik, mesin pengayak, alat pelet, alat pengering, alat pewaduhan yang terpilah, Black Soldier Fly (BSF), Biodigester, wadah pemilahan khusus, truk sampah kompaktor pengumpul sampah terpilah.



Progress Pengadaan Peralatan untuk Revitalisasi TPS3R di Kabupaten Badung



Progress Pengadaan Peralatan untuk Revitalisasi TPS3R di Kabupaten Badung



Progress Pengadaan Peralatan untuk Revitalisasi TPS3R di Kabupaten Badung



Pelaksanaan DAK Fisik Cadangan Bidang Sanitasi sama seperti pelaksanaan DAK TA. 2021 dimana dimulai dengan pengusulan menu kegiatan pada aplikasi KRISNA, fase sinkronisasi dan harmonisasi, serta penyusunan Rencana Kegiatan pada fase konsultasi program. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sarbagita telah mengusulkan kegiatan sesuai dengan kebutuhan tiap daerah. Fase sinkronisasi dan harmonisasi merupakan tahapan penilaian kedua yang menghasilkan daftar singkat (shortlist) usulan rencana kegiatan termasuk ranking urusan prioritas dan mendiskusikan terkait dengan kesesuaian rincian menu, lokasi prioritas, volume kegiatan, cara pengadaan, dan kewajaran harga satuan. Pada saat fase penyusunan rencana kegiatan, pemerintah pusat juga melakukan pengecekan terhadap usulan pemerintah daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 agar tidak terdapat duplikasi usulan di desa yang sama dengan usulan pada DAK Cadangan TA. 2021. Adapun kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Kabupaten/Kota Sarbagita dan telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel.

Rencana Kegiatan DAK Fisik Cadangan Bidang Sanitasi TA. 2021 untuk Menu Revitalisasi TPS3R/TPST Terbangun

No	Provinsi	Kab/Kota	Rencana Kegiatan		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Revitalisasi TPS3R/TPST Terbangun		
			Usulan	Volume (Unit)	Total Kebutuhan (Rp)
1.	Bali	Kota Denpasar	5	5	2,239,841,600
2.	Bali	Kab. Badung	17	17	17,652,652,160
3.	Bali	Kab. Gianyar	2	2	275,750,000
4.	Bali	Kab. Tabanan	4	4	2,603,800,000
Total			28	28	22,772,043,760

Rencana Kegiatan DAK Fisik Cadangan Bidang Sanitasi TA. 2021 untuk Menu Pembangunan TPS 3R Baru

No	Provinsi	Kab/Kota	Rencana Kegiatan		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Pembangunan TPS3R Baru		
			Usulan	Volume (Unit)	Total Kebutuhan (Rp)
1.	Bali	Kota Denpasar	27	27	29,880,150,669
2.	Bali	Kab. Badung	-	-	-
3.	Bali	Kab. Gianyar	27	27	18,900,000,000
4.	Bali	Kab. Tabanan	8	8	11,684,308,000
Total			62	62	60,464,458,669

Pada awal bulan Desember 2021, progress pelaksanaan kegiatan di keempat kabupaten/kota Sarbagita telah mencapai kurang lebih 50% dan ditargetkan dapat selesai dan beroperasi di tahun 2022. Kegiatan DAK Fisik Cadangan Bidang Sanitasi ini diharapkan

dapat mengubah perilaku masyarakat dan mendorong penanganan persampahan yang terintegrasi dari hulu ke hilir sehingga dapat mengurangi volume sampah yang akan diproses di TPA *



Penyusunan Konsep Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Infrastruktur

TAHUN BUDAYA DAN KERJA 2022



Peserta Offline Kegiatan Penyusunan Konsep Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Infrastruktur

PENYUSUNAN KONSEP PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DAK INFRASTRUKTUR TA. 2022

Oleh : Indra Jaya Krisna,

Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan pedoman yang disetujui dalam penyelenggaran DAK yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai follow-up dari Peraturan Presiden terkait dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA. 2022 dalam waktu dekat akan ditetapkan, maka Petunjuk Operasional sebagai turunan dari Petunjuk Teknis juga harus segera dipersiapkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan DAK.

Patut Fasilitasi Infrastruktur Daerah melalui Bidang Perencanaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Konsep Petunjuk

Operasional DAK Infrastruktur TA. 2022 sebagai bentuk nyata melaksanaan tugas perencanaan, pembinaan, dan pemantauan penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari hari Rabu, 15 Desember 2021 hingga hari Kamis, 16 Desember 2021 di Hotel Grand Zuri, BSD City dan dilaksanakan sesuai ketentuan Protokol Kesehatan COVID-19 sesuai anjuran pemerintah.

Pada hari pertama, dibuka dan diresmikan oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Bapak Riono Suprapto, SE., ST., MT. Beliau memberikan sambutan yang berisi urgensi dari penyusunan Konsep Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Infrastruktur TA. 2022 dan mengingatkan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk membahas batang tubuh

dan lampiran Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang PUPR agar dalam waktu dekat Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang PUPR TA. 2022 dapat segera ditetapkan sesuai amanat peraturan. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah konsep teknis Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang PUPR 2022 yang sudah final.

Dari tahun-ketahun, DAK dalam pelaksanaanya seringkali mengalami perubahan kebijakan, diantaranya adalah perubahan pada menu kegiatan dan rincian kegiatan. Perubahan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi penyelenggaran DAK tahun sebelumnya serta kebutuhan daerah, dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sesuai dengan prioritas nasional. Sehubungan dengan te-



Pembukaan Kegiatan Penyusunan Konsep Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Infrastruktur oleh Kepala Pusat FID

lah dilakukannya Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Perpres tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik TA. 2022 dan akan dimulainya kegiatan DAK Infrastruktur PUPR TA 2022, maka perlu disusun peraturan mengenai petunjuk operasional untuk mengatur penyelenggaraan DAK Infrastruktur PUPR TA 2022.

Mekanisme pengalokasian DAK didasarkan melalui usulan daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketidaksesuaian antara alokasi DAK dengan kebutuhan daerah. Beberapa mekanisme pengusulan telah dilakukan dan yang terakhir pengusulan kegiatan DAK diusulkan pemerintah daerah melalui aplikasi KRISNA DAK yang telah dilakukan sejak pengalokasian DAK TA. 2020 hingga saat ini. Usulan pemerintah daerah yang disampaikan melalui aplikasi KRISNA DAK akan diverifikasi dan dibahas bersama antara Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian teknis terkait dengan Pemerintah Daerah.



OUTLINE LAMPIRAN PETUNJUK OPERASIONAL

LAMPIRAN I (Arah Penyusunan Renstra)

1. Isu Renstra DAK
2. Tahapan Penyusuna Renstra DAK
3. Mekanisme Penyusunan Renstra DAK
4. Analisa isu dan Permasalahan
5. langkah-langkah menentukan GAP infrastruktur dan Pedoman
6. Menghitung kebutuhan DAK 5 tahun kedepan
7. Identifikasi kegiatan 5 tahun
8. menyusun urutan prioritas rencana kegiatan

LAMPIRAN II (Mekanisme Teknis Pelaksanaan)

1. Bidang Irigasi
2. Bidang Jalan
3. Bidang Air Minum
4. Bidang Sanitasi
5. Bidang Perumahan dan Permukiman

LAMPIRAN IV (Mekanisme PE dan Pelaporan)

1. Mekanisme Pelaporan
2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

LAMPIRAN III (Tim Koordinasi DAK)

1. Struktur dan alur koordinasi Tim Koordinasi Pusat
2. Struktur dan Alur Koordinasi Tim Koordinasi Daerah
3. Tahap Perencanaan Proses Pengusulan Usulan DAK Infrastruktur PUPR
4. Tahap Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan

Optimalisasi pelayanan publik yang efektif dan efisien menjadi perhatian utama pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan publik bagi masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pembangunan Infrastruktur kewenangan Pemerintah Pusat

baik dalam kegiatan sosialisasi kebijakan sampai dengan kegiatan pembangunan infrastruktur. Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.



PENDAMPINGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAK FISIK INFRASTRUKTUR PUPR

Oleh : Indra Jaya Krisna,

Pembangunan Infrastruktur PUPR didaerah erat kaitannya dengan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur PUPR yang menjadi bagian penting dalam peningkatan unsur pelayanan publik kepada masyarakat didaerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 5 tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 bahwa Kementerian menyiapkan arahan penyusunan dokumen

Rencana Strategis DAK dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun untuk Pemerintah Daerah penerima DAK yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR melalui Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah.

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah memiliki tugas dalam memfasilitasi penyusunan Dokumen Renstra DAK yang akan dijadikan dasar menyusun usulan rencana kegiatan DAK setiap tahun dan usulan perubahannya, sehingga pada hari senin tanggal 6 Desember 2021 dilaksanakannya kegiatan Pendampingan Pemerintah Da-

erah dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur PUPR di Hotel Aveon Yogyakarta. Kegiatan tersebut diselenggarakan selama 2 (dua) hari dan dihadiri oleh Perwakilan Bappeda dan Dinas penerima DAK Fisik Infrastruktur PUPR dari 19 (Sembilan Belas) Provinsi/Kabupaten/Kota secara Offline dan 16 Provinsi/Kabupaten/Kota secara Online.

Hari pertama, acara pertama kali dibuka dengan laporan ketua panitia yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah Bapak



Ir. Anum Kurniawan, M.Sc. Beliau menyampaikan bahwa acara penyusunan Renstra DAK ini merupakan acara yang pertama kali diselenggarakan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Menteri PUPR nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Infrastruktur PUPR. Adapun tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan Rencana Strategis DAK Fisik agar tercipta Rencana Strategis DAK yang baik sehingga program-program yang didanai DAK dengan program-program prioritas nasional di daerah-daerah penerima DAK dapat sinkron dan saling bersinergi. Kemudian, acara diresmikan oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Bapak Riono Suprapto, SE., ST., MT. Beliau memberikan sambutan berisi tentang arah kebijakan penyusunan Renstra DAK sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Infrastruktur PUPR TA. 2021.



Dalam menghadapi perkembangan ekonomi yang dinamis, Renstra DAK harus bersifat up-to-date sehingga dalam penyusunannya, Dokumen Renstra DAK dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan target, sasaran, dan isu strategis yang berkembang. Penyusunan Renstra DAK pada dasarnya memiliki 4 (empat) Urgensi, sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Program Pemerintah Daerah lebih terintegrasi dan Sinkron dengan Perencanaan Nasional (RPJMN);
2. Pemerintah Daerah memiliki perencanaan dan program serta skema pendanaan DAK Fisik Infrastruktur PUPR untuk periode 5 tahun (Jangka Menengah);
3. Pemerintah Daerah dapat mengklasifikasi urutan prioritas Usulan Rencana Kegiatan (URK) sesuai dengan DAK Reguler, DAK Penugasan, dan DAK Afirmasi, serta selaras dengan tematik dalam RPJMN;
4. Sumber Pendanaan yang tidak tumpang tindih antara DAK dan sumber pendanaan lainnya.

PENYUSUNAN URUTAN PRIORITAS



Sumber: Permen PUPR 5/2021

Komitmen Pusat FID dalam melaksanakan fasilitasi penyusunan Renstra DAK tertuang dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Acuan Penyusunan Rencana Strategis DAK Infrastruktur PUPR yang memiliki tahapan:

1. Tahap Persiapan;
2. Analisa Kebijakan DAK Infrastruktur;
3. Perumusan Draft Renstra Dak; dan
4. Penyusunan Draft Renstra DAK.

Acara pada hari pertama juga diisi oleh narasumber dari Kemendagri yang memberikan paparan mengenai Koordinasi dan Intervensi penyusunan Rencana Strategis Daerah dengan Rencana Strategis DAK. Selain dari Kemendagri, Pusat FID juga menghadirkan narasumber dari Bappenas yang memberikan paparan mengenai Arah Kebijakan Penyusunan Renstra DAK Infrastruktur.



Paparan Narasumber dan Tanya Jawab dengan Pemda peserta kegiatan

TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA DAK INFRASTRUKTUR PUPR



Rencana Strategis (Renstra) DAK yang telah dibuat akan digunakan sebagai alat untuk menyinergikan dan menyinkronkan program DAK yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dokumen renstra DAK disusun berdasarkan beberapa dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra SKPD, Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah, Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Perumahan, Rencana Capaian SPM Pemerintah Daerah dan Dokumen perencanaan lainnya.

Renstra DAK Infrastruktur PUPR berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Program. Pada bagian program, saat ini Pusat dan Daerah memiliki program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah yang berfokus pada Pengembangan Food Estate



dan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Irigasi); Kemantapan Jalan, Aksesibilitas menuju simpul Transportasi, fasilitas-fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat-pusat perekonomian daerah, konektivitas (Jalan); Penurunan angka kematian ibu dan stunting, penanggulangan kemiskinan, penurunan kumuh dan pelayanan dasar pemenuhan SPM (Perumahan dan Permukiman).

Pada hari kedua, acara Pendampingan Pemerintah Daerah

dalam Penyusunan Rencana Strategis DAK Fisik Infrastruktur PUPR diisi dengan presentasi dari Pemerintah Kota Payakumbuh secara Offline dan Pemerintah Kota Tarakan secara Online. Masing-masing dari dinas tersebut mempresentasikan Rencana Strategis DAK yang telah disusun dan dibuat, sehingga Renstra DAK kedua Dinas tersebut menjadi percontohan bagi Dinas-dinas yang lain untuk menyusun Renstra DAK Fisik Infrastruktur PUPR *

PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

KALENDER 2022



JANUARI

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

01 Januari Tahun Baru 2022

FEBRUARI

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU
			1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

01 Februari Tahun Baru imlek 2573 Kongzili
28 Februari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

MARET

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

01 Maret Hari Suci Nyepi 1944

APRIL

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU
			1	2		
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

15 April Jumat Agung

MEI

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU
	1	2	3	4	5	6
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

01 Mei Hari Buruh
02-03 Mei Idul Fitri
16 Mei Hari Raya Waisak
26 Mei Kenaikan Isa Almasih

JUNI

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

01 Juni Hari Lahir Pancasila

JULI

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU
			1	2		
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

09 Juli Idul Adha
30 Juli Tahun Baru Hijriyah

AGUSTUS

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

17 Agustus Hari Kemerdekaan

OKTOBER

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU
			1			
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

08 Oktober Maulid Nabi

NOVEMBER

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU
	1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

25 Desember Hari Natal

DESEMBER

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU
	1	2	3			
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31